

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara terus menerus dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk membangun negara. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan, bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar dapat memberdayakan daerahnya serta dapat berkompetensi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (Hartina, 2009). Otonomi daerah juga memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi atau pemerintahan. Pengelolaan keuangan adalah mengenai efisiensi dalam hal keuangan dan penggunaan yang efektif anggaran yang tersedia (Ojo, 2009). Pemerintah daerah harus secara hati-hati mengelola keuangan daerahnya guna mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau tidak perlu. Agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, proses pengelolaan keuangan suatu daerah harus diatur sebaik mungkin sesuai dengan standar dan undang-undang yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah sudah cukup banyak dilakukan di luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Adebayo dan rekan (2014) mengenai penilaian pengelolaan keuangan dana pemerintah daerah yang

efektif pada pemerintah daerah Ido-Osi di Nigeria. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada sebuah kebutuhan darurat sistem pemerintahan daerah di Nigeria untuk mengembangkan mekanisme pengendalian keuangan mereka dan untuk merasionalkan pola-pola penggunaan anggarannya dari pada mencapai kinerja yang maksimal. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah sebelumnya juga telah dilakukan oleh Ojo (2009) yang membahas tentang peran pemerintah daerah dan mendefinisikan arti pengelolaan keuangan lebih sederhana yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai berbagai macam metode pengelolaan keuangan, instrumen pengelolaan keuangan, teknik pengelolaan keuangan seperti: penggunaan anggaran, pendekatan rasional, pendekatan incremental, dan lainnya.

Di Indonesia penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai pembaharuan pengelolaan keuangan sektor publik, studi kasus pada tiga pemerintah daerah di Indonesia, yaitu: pemerintah daerah Jakarta, Tangerang dan Pandeglang, oleh Mir dan Sutiyono (2013). Penelitian tersebut menemukan bahwa inisiatif-inisiatif pembaruan tersebut telah gagal mencapai tujuan pengembangan transparansi dan akuntabilitas seperti yang diindikasikan oleh auditor publik. Hal itu ditemukan dalam pembaruan akuntansi sektor publik Indonesia, permintaan, persiapan, dan kualitas informasi akuntansi berada dalam keadaan tidak seimbang.

Penelitian lainnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Suparno (2012), Saleba (2014) dan Rizki (2015). Penelitian-penelitian tersebut menemukan beberapa bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan pemerintah

daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah penelitian Suparno (2012) dan Rizki (2015). Hasil penelitian Rizki (2015) menyatakan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Labuhan Batu, sedangkan hasil penelitian Suparno (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Dumai.

Selain akuntabilitas keuangan daerah, *value for money* merupakan faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparno (2012) pada kota Dumai dan Rizki (2015) pada kabupaten Labuhan Batu menyatakan bahwa *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan daerah.

Kejujuran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Rizki (2015) menyatakan bahwa kejujuran berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Labuhan Batu, sedangkan hasil penelitian Suparno (2015) menyatakan kejujuran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Dumai.

Transparansi juga merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparno (2012) pada kota Dumai dan Rizki (2015) pada kabupaten Labuhan Batu

menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan daerah.

Pengawasan adalah faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Suparno (2012) menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Dumai, sedangkan penelitian Rizki (2015) menyatakan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda dengan menggunakan variabel yang sama namun pada daerah yang berbeda. Hal ini mendorong peneliti untuk kembali melakukan pengujian mengenai akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada daerah pemerintahan yang berbeda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kota Dumai)”. Persamaan dengan penelitian Suparno (2012) adalah penggunaan variabel independen akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, dan transparansi, serta variabel dependen pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini mengganti variabel independen pengawasan dengan variabel independen sistem

pengendalian intern pemerintah dan menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia berdasarkan penelitian yang sudah diuji sebelumnya oleh Saleba (2014) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Baubau.

Perbedaan kedua adalah penelitian ini meneliti efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Binjai. Peneliti memilih pemerintah kota Binjai karena pada tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Binjai. Hal tersebut disebabkan oleh hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan kelengkapan, seperti belum lengkapnya laporan dalam hal penyusunan aset (binjaikota.go.id).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Binjai”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?

2. Apakah akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?
3. Apakah *value for money* berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?
6. Apakah kejujuran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?
7. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Binjai?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan dan penafsiran diluar hasil yang diinginkan, maka penelitian ini difokuskan kepada pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, kejujuran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Variabel independen tersebut dipilih karena variabel tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, kejujuran dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Binjai?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan dan kejujuran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Binjai secara simultan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan bukti ilmiah bahwa akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan dan kejujuran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara simultan. Bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau saran serta masukan mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif bagi setiap SKPD pada pemerintahan kota Binjai.

